

**PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA DALAM MENUNJANG PENINGKATAN  
EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI GAMpong  
PADANG BARU KECAMATAN SUSOH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :  
FACHRUL RAZY  
NIM. 160802107**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022 M/ 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fachrul Razy  
NIM :160802107  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 06 Juli 1998  
Alamat : Kuta Tuha, Kec. Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, *Semarang 25 Juli 2022*

Yang Menyatakan



**FACHRUL RAZY**

NIM.160802107

**PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA DALAM MENUNJANG PENINGKATAN  
EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI GAMPONG  
PADANG BARU KECAMATAN SUSOH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

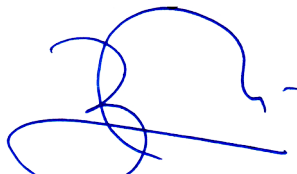
**FACHRUL RAZY**

NIM. 160802107

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :


Pembimbing I,



**Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.**

NIP. 196610231994021001

Pembimbing II,



**Muazzinah, B.Sc., MPA.**

NIP. 198411252019032012

**PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA DALAM MENUNJANG PENINGKATAN  
EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI GAMPONG  
PADANG BARU KECAMATAN SUSOH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Juli 2022  
26 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.  
NIP. 196610231994021001

Sekretaris,

  
Muazzinah, B.Sc., MPA.  
NIP. 198411252019032012


Penguji I,

  
Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.  
NIP.196110051982031007

Penguji II,

  
Nasru Hadi, SE., MM.  
NIDN. 1313129301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum.  
NIP.197307232000032002



## ABSTRAK

Sumber daya pesisir dan laut memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena memiliki hasil alam yang berlimpah dan bernilai tinggi. Oleh karena itu wilayah pesisir dan laut menjadi salah satu sumber daya alam yang menjanjikan dan layak untuk dieksplor potensinya karena memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Namun, di Kabupaten Aceh Barat Daya potensi sumber daya pesisir dan laut belum dikelola secara optimal, sehingga belum dapat memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat terbukti dari banyaknya nelayan kecil yang hidup di ambang kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta faktor yang menjadi penghambat dalam upaya menunjang peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DKP sesuai dengan 3 indikator peran yaitu, peran sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator. Hal ini dapat dilihat dari adanya regulasi, pemberdayaan masyarakat nelayan, penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung jalannya usaha dan sejumlah pembinaan yang dilakukan oleh DKP Aceh Barat Daya. Namun, ada tiga faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian, yaitu pandemi covid-19, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran DKP dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat nelayan sudah berjalan dengan baik dan bantuan yang diberikan memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Namun adanya pandemi, keterbatasan anggaran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menghambat peran DKP dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Peningkatan ekonomi, Masyarakat Nelayan.*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat-Nya dari jaman jahiliyah menuju jaman islamiyah. Penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi Di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh)” ini merupakan usaha yang penulis lakukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Warul Walidin, Ak. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. dan Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk

membimbing, memberikan saran, motivasi serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, terutama kepada Prodi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Ayah dan Ibu tercinta Muhammad Ismail dan Ummaroh, yang sangat luar biasa mendampingi penulis untuk bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya, untuk do'a, cinta, dukungan dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya dan masyarakat nelayan Gampong Padang Baru yang sudah memberikan informasi, mendukung, memudahkan, dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Atas semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga menjadi amal baik dan ilmu dalam skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya meskipun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, segala kritikan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Demikian, semoga skripsi ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang.



Banda Aceh,  
Penulis,

Fachrul Razy  
NIM. 160802107

## DAFTAR ISI

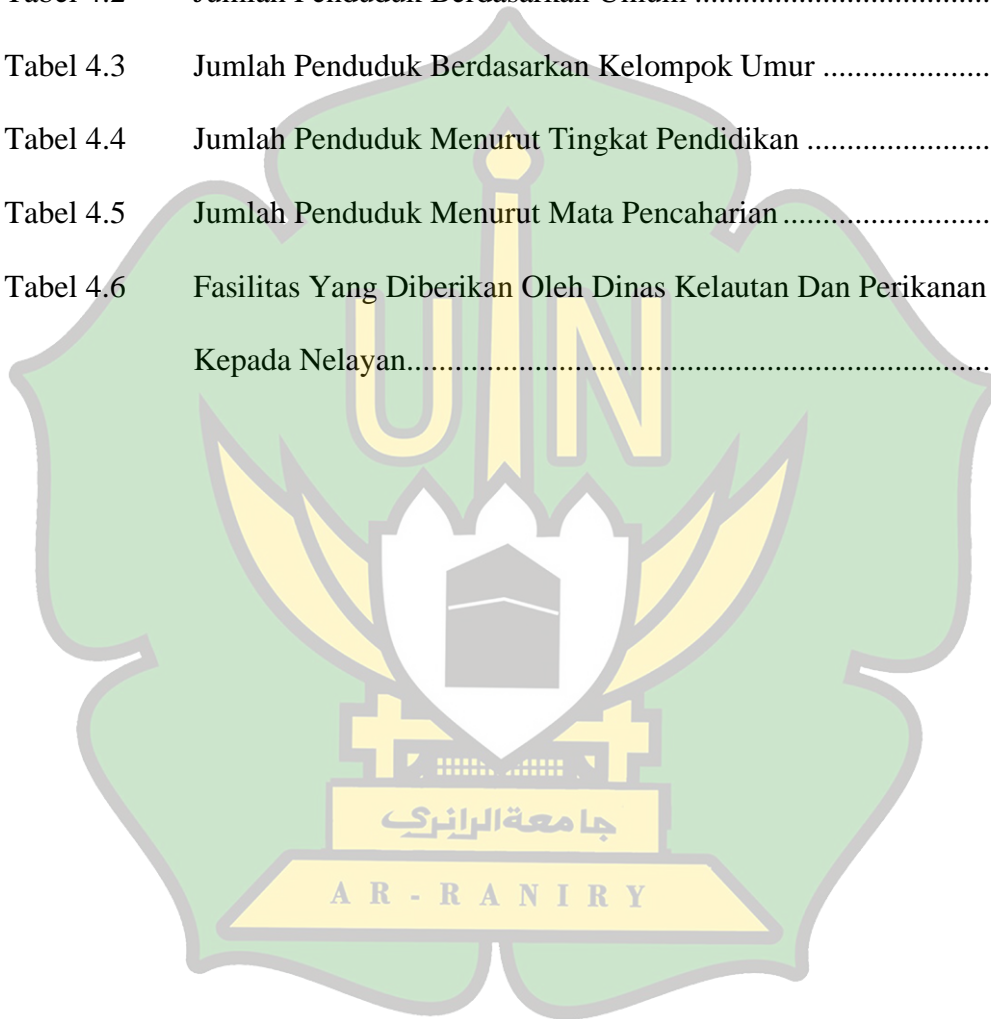
<b>LEMBARAN JUDUL</b>		
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>		<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>		<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>		<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>		<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>		<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>		<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>		<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>		<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>		<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>		<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....		1
1.2    Identifikasi Masalah .....		4
1.3    Rumusan Masalah .....		5
1.4    Tujuan Penelitian.....		5
1.5    Manfaat Penelitian.....		5
1.6    Penjelasan Istilah.....		6
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>9</b>
2.1.   Penelitian Terdahulu.....		9
2.2.   Teori Peran .....		12
2.3.   Teori Implementasi Kebijakan Publik.....		14
2.4.   Teori Organisasi .....		15
2.5.   Dinas Kelautan dan Perikanan .....		16
2.5.1 Tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap.....		18
2.5.2 Tugas Kepala Bidang Bina Usaha .....		23
2.6.   Teori Ekonomi Masyarakat.....		26
2.7.   Pengertian Masyarakat Nelayan.....		31

	2.8. Kerangka Pemikiran .....	32
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
	3.1. Desain Penelitian.....	33
	3.2. Definisi Operasional Variabel.....	34
	3.3. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
	3.4. Lokasi Penelitian .....	35
	3.5. Jenis dan Sumber Data .....	36
	3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	37
	3.7. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
	4.1. Gambaran Lokasi Penelitian .....	40
	4.1.1 Profil Dinas Kelautan dan Perikanan.....	40
	4.1.2 Profil Gampong Padang Baru .....	43
	4.2. Pembahasan .....	51
	4.2.1 Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan .....	51
	4.2.2 Faktor Penghambat Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan .....	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
	5.1 Kesimpulan.....	71
	5.2 Saran.....	72
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>94</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Informan Kunci .....	32
Tabel 4.1	Jenis Kegiatan Sosial Yang Dilakukan Masyarakat.....	41
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umum .....	43
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur .....	43
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	44
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	45
Tabel 4.6	Fasilitas Yang Diberikan Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kepada Nelayan.....	57



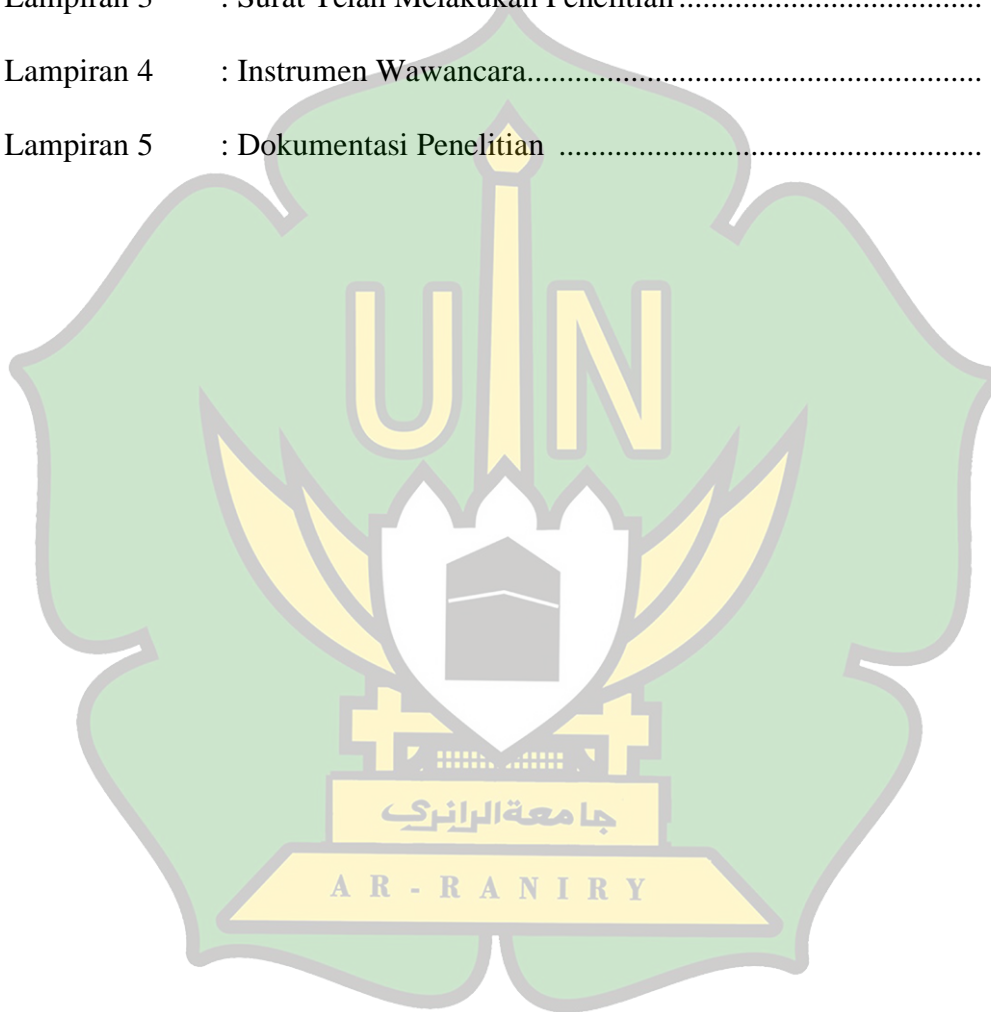
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	28
Gambar 4.1	Bantuan Baju Pelampung Kepada Nelayan.....	56
Gambar 4.2	Bantuan Cool Box Kepada Nelayan.....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Keputusan Pembimbing.....	74
Lampiran 2	: Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas .....	75
Lampiran 3	: Surat Telah Melakukan Penelitian .....	76
Lampiran 4	: Instrumen Wawancara.....	77
Lampiran 5	: Dokumentasi Penelitian .....	84



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aceh merupakan provinsi yang berada di ujung Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat dalam wilayah NKRI dengan luas wilayah daratan 57.365,67 km persegi, dengan panjang garis pantai 2.666,27 km dan memiliki sekitar 119 pulau. Sedangkan luas perairannya mencapai 295.370 km persegi, yang terdiri dari perairan teritorial dan kepulauan 56.563 km persegi, serta perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) 238.807 km persegi. Potensi lestari diperkirakan mencapai 272,7 ribu ton/tahun, jumlah kapal penangkap ikan 16.701 unit dan jumlah nelayan 64.466 orang. Dengan gambaran geografis sedemikian rupa, maka dapat dipastikan Aceh memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, khususnya di sektor perikanan. Namun, potensi sumber daya pesisir dan laut Aceh saat ini belum dikelola secara optimal sehingga belum dapat memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.

Fenomena kesejahteraan nelayan yang rendah merupakan permasalahan yang sering terjadi, namun masalah ini masih belum dapat diselesaikan hingga kini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya hasil tangkapan ikan. Banyaknya tangkapan yang secara langsung berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan hidup sangat ditentukan oleh pendapatan yang diterima.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir pasal 63 yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintahan Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya”.<sup>1</sup>

Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengurus segala urusan kelautan dan perikanan harus mampu menjadi fasilitator yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat nelayan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam pasal 3 poin a adalah salah satu tujuan adanya perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan nelayan dalam mengembangkan usaha.<sup>2</sup>

Salah satu daerah di Aceh yang mempunyai potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup besar yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh. Ada sekitar 1038 masyarakat di Kecamatan Susoh yang berprofesi sebagai nelayan, penduduknya bermukim di wilayah pesisir dan kehidupannya bergantung dari sumber daya kelautan. Sebagai masyarakat yang masih kental dengan budaya mereka masih mempercayai adanya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

hari-hari baik untuk pergi berlayar ke laut, sehingga adat budaya masih di junjung tinggi oleh masyarakat di sana.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya No 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, Tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap adalah membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap, guna meningkatkan hasil Ikan tangkap dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan, serta menyediakan sarana perikanan Tangkap, memfasilitasi Alat tangkap ikan, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan serta peyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan.

Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya alam pesisir Gampong Padang Baru, Kecamatan susoh dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang sangat beragam. Permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan tentu menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerjanya dalam hal memberikan fasilitas sarana maupun prasarana kepada nelayan.

Oleh karena itu peran dari Dinas Kelautan dan Perikanan sangat diperlukan dalam membina, memfasilitasi dengan menyediakan infrastruktur yang baik bagi para nelayan untuk menunjang segala kebutuhan yang diperlukan sebagai upaya peningkatan ekonomi para nelayan serta Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum agar tidak terjadinya miskonsepsi terkait dengan bagaimana kebijakan harus di implementasikan.



Maka berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kab. Aceh Barat Daya).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru. Dengan kondisi geografis yang sebagian besarnya adalah wilayah pesisir, maka peranan dari Dinas Kelautan dan Perikanan sangatlah dibutuhkan untuk mengeksplor potensi kelautan khususnya di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan juga diperlukan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan khususnya nelayan kecil yang mayoritas hidupnya di ambang batas kemiskinan. Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat nelayan melalui peran pemerintah.

Gampong Padang Baru merupakan tempat berkumpulnya seluruh nelayan yang ada di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, di gampong ini juga terdapat sebuah TPI atau tempat penampungan ikan, sehingga dengan dua alasan tersebut peneliti tertarik untuk menjadikan Gampong Padang Baru sebagai objek penelitian. Maka dari itu peneliti merasa perlu untuk melihat bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan daam meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di

Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan apa saja faktor yang mendukung dan yang menghambat Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan perannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya ?
2. Faktor penghambat Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat Nelayan di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Kelautan dan perikanan dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat Nelayan di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian diantaranya :

1. Aspek praktis, Penelitian ini di harapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya masalah yang berkaitan di masalah pesisir serta Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian yang sejenis pada waktu yang akan datang.
2. Aspek Akademis, diharapkan dapat memberi informasi yang kontruksi guna di jadikan bahan masukan bagi seluruh masyarakat yang terdapat di wilayah pesisir yang dominan dimana bermata pencaharian sebagai nelayan pada umumnya yang berada di Gampong Padang Baru serta dapat berguna bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat nelayan terutama yang berada di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh.

#### **1.6 Penjelasan Istilah**

- a. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.<sup>3</sup>
- b. Peningkatan ekonomi  
Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 267.

<sup>4</sup> Sukirno Sadono, 2016. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. hlm.10

- c. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- d. Nelayan adalah orang-orang yang secara aktif melakukan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung
- e. Keuchik adalah Kepala Badan eksekutif gampong dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.<sup>5</sup>
- f. Gampong adalah gampong dan gampong adat atau yang disebut selanjutnya dengan gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan peraturan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem peraturan Negara Indonesia.
- g. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- h. *Fishing ground* (daerah penangkapan ikan) adalah daerah atau area dimana populasi organisme dapat dimanfaatkan sebagai hasil perikanan, yang bahkan apabila memungkinkan diburu oleh nelayan di kapal-kapal penangkap ikan dengan menggunakan peralatan penangkapan ikan yang dimilikinya.
- i. Panglima Laot adalah salah satu lembaga adat di Aceh yang membuat keputusan mengenai ketentuan hukum adat laut yang berlaku bagi nelayan di seluruh Aceh, dengan fungsi, tugas dan kewenangannya tersendiri.<sup>6</sup> Panglima

---

<sup>5</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Bab IV pasal 11

<sup>6</sup> Qanun No.10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Laot juga merupakan suatu institusi adat yang mengatur tentang tata cara meupayang/ penangkapan ikan di laut. Panglima laot selain sebagai institusi juga sebagai seorang ketua lembaga institusi itu sendiri.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

1. Hamdan dalam skripsinya yang berjudul *“Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Jepara Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Pesisir”*. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program PEMP di Kabupaten Jepara dikatakan cukup berhasil karena terlihat dari segi kelembagaan dengan adanya pembentukan kelompok, mekanisme perguliran dana penyerapan dana bantuan yang dapat terlaksana dengan baik. Meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tersebut terutama dari aspek pengembalian pinjaman, akan tetapi program PEMP di Kabupaten Jepara dari hasil analisis data dalam penelitian ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.<sup>7</sup>

Perbedaannya dalam penelitian ini membahas mengenai evaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti membahas mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi. Kemudian yang menjadi pembeda yang kedua adalah objek dan tempat penelitiannya

---

<sup>7</sup> Hamdan, 2017 *“Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Jepara dalam upaya Peningkatan Pendapatan Pesisir”*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.



2. Kaswandi tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul "*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar*". Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Takalar telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan nelayan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.<sup>8</sup>

Perbedaannya dalam penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti membahas mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi. Kemudian yang menjadi pembeda yang kedua adalah objek dan tempat penelitiannya yang dimana penelitian ini dilakukan di Dusun Susoh Kecamatan Burau Kabupaten Aceh Barat Daya .

3. Nurfadhilah T dalam skripsinya yang berjudul "*Peranan Masyarakat Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Di Gampong Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun dalam penelitian ini di simpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, masyarakat nelayan di Gampong Kenje mewujudkan dalam empat perannya baik dalam

---

<sup>8</sup> Kaswandi, 2017 "*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar*" Jurnal Universitas Hasanuddin Nakassar.

lingkungan rumah tangga, dalam bidang ekonomi, pendidikan anak maupun dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai peranan masyarakat nelayan terhadap peningkatan ekonomi, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi. Kemudian yang menjadi pembeda yang kedua adalah objek dan tempat penelitiannya.

4. Penelitian yang relevan berikutnya adalah penelitian Amal dalam skripsinya yang berjudul "*Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barru*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah peran Dinas Kelautan dan Perikanan sudah cukup bagus dengan adanya program yang dijalankan. Namun pengadaan bantuan masih perlu ditingkatkan. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat dimana faktor pendukung yaitu sinergitas dari setiap elemen pemerintah dan partisipasi dari masyarakat (petani tambak) sedangkan faktor penghambat yaitu kualitas sumber daya manusia masih rendah dan cuaca yang tidak menentu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Nurfadhillah T, 2016. "*Peran Masyarakat Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Gampong Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Madar*", Skripsi Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.

<sup>10</sup> Amal, 2016. *Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Barru*, Skripsi. Universitas Hasanuddin: Makassar.

Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai peranan dinas kelautan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi.

## 2.2. Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.<sup>11</sup>

Teori yang mendukung penelitian ini adalah role theory (teori peran) yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku Sosiologi sebagai pengantar. Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan. Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 267.

Menurut Yusuf dalam Lingga, untuk mengarahkan masyarakat pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, perlu adanya peran dari pemerintah di dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan yang secara optimal dan mendalam untuk memberdayakan masyarakat, maka peran yang dimaksud antara lain:<sup>12</sup>

1. Peran sebagai Regulator.

Peran sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Peran sebagai Dinamisator.

Peran sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan di wujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Peran sebagai Fasilitator.

Peran sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatangi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator

---

<sup>12</sup> Lingga, Doriani. 2011. *Peranan Aparatur Pemerintah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi di atas, pemerintah memiliki alat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang dinamakan dengan aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah ialah alat pemerintah untuk menjalankan semua tugas-tugas pemerintahan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian, kaitan teori dengan penelitian ini sejauh mana peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat nelayan, berdasarkan teori peran ini dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan didalam status tertentu dimanapun dia berada dan mengikuti kaedah-kaedah atau peraturan tertentu.

#### **A. Pengertian Masyarakat Nelayan**

Nelayan merupakan sekelompok masyarakat pesisir yang secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok nelayan ini juga mendominasi pemukiman di wilayah pantai pada pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Kusnadi Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan

---

<sup>13</sup> Nikijuluw Victor, *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Peisisir Secara Terpadu*. Bogor: IPB Bogor.2001.



berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.<sup>14</sup>

### 2.3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Menurut Tresiana dan Duadji, Implementasi juga bisa ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.<sup>15</sup>

Kebijakan adalah rancangan suatu program, ide dan juga gagasan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah, kebijakan juga merupakan serangkaian keputusan-keputusan dan juga agenda-agenda yang dibuat dan disahkan oleh pihak tertentu berdasarkan permasalahan yang dalam penerapannya memiliki sisi positif dan negatif namun tetap berdasarkan pada asas yang paling utama, yaitu demi kepentingan masyarakat banyak.

Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan. Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Menurut Winarno ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia.

---

<sup>14</sup> Kusnadi. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.2006.

<sup>15</sup> Tresina Novita dan Dua dji Noverman, 2017. *Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pengembangan Daerah*. Yogyakarta : Suluh Media.



Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

#### 2.4. Teori Organisasi

Ilmu Organisasi merupakan bagian dari ilmu administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi, jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari ilmu administrasi. Pengertian organisasi menurut Hasibuan adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Mathis dan Jackson dalam Erni adalah organisasi merupakan sekelompok manusia yang membentuk suatu kesatuan sosial yang saling berinteraksi dengan pola tertentu sehingga setiap anggotanya memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas sehingga bisa dipisahkan.<sup>17</sup>

Berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan oleh para pakar dapat ditarik kesimpulan, bahwa organisasi merupakan kolektivitas kelompok orang yang melakukan interaksi berdasarkan hubungan kerja serta pembagian kerja dan aktivitas yang tersusun secara hirarki dalam suatu struktur untuk mencapai tujuan organisasi.

---

<sup>16</sup> Hasibuan. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. hlm. 24

<sup>17</sup> Rernawan, Erni, 2011. *Budaya Organisasi Dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta. hlm. 15

## 1. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat Daya merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertugas untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekosentrasi di bidang Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya diuraikan sebagai berikut: Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya menyelenggarakan fungsi:<sup>18</sup>

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang kelautan dan perikanan;

---

<sup>18</sup> Rencana Strategis, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017-2022.

- c. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, bidang usaha kelautan dan perikanan serta perikanan budidaya;
- e. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan meliputi pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan, usaha kelautan dan perikanan, perikanan budidaya serta UPT Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja dinas, dan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap**

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap. Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas:<sup>19</sup>

1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

---

<sup>19</sup> Rencana Strategis, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017-2022

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai seksi masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
6. Mengawasi perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Perikanan Tangkap untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
7. Mengendalikan penyusunan rencana pemanfaatan sumberdaya Perikanan Tangkap sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka tercapainya sasaran pelaksanaan kegiatan;
8. Mengawasi penyiapan bahan kebijakan prasarana dan sarana Perikanan Tangkap sesuai dengan kebutuhan dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat;
9. Mengendalikan pelaksanaan penyebaran informasi teknologi dan penyediaan sarana Perikanan Tangkap sesuai kebutuhan untuk peningkatan informasi teknologi kepada masyarakat;
10. Mengendalikan jaminan mutu dan keamanan pangan Perikanan Tangkap sesuai peraturan untuk peningkatan mutu dan stabilitas produksi perikanan;

11. Mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kapasitas nelayan;
12. Mengawasi penyiapan bahan kebijakan operasional pelabuhan perikanan sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk peningkatan kebijakan dan pelayanan;
13. Mengatur kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
14. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perikanan Tangkap;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis;
16. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari beberapa Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, dan masing-masing seksi mempunyai tugas.

- 1) Seksi Kapal Perikanan dan Alat Tangkap mempunyai tugas:

membantu Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi yang berhubungan dengan bidang kapal perikanan dan alat tangkap ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) Seksi Kapal Perikanan dan Alat Tangkap mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan standarisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan;
- b. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan;
- c. Pelaksanaan kegiatan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan serta penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun petunjuk teknis Seksi Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan sesuai peraturan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi urusan pemerintah dalam hal kapal perikanan dan alat tangkap ikan serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi;
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan reaslisasi bantuan keuangan dan hibah/ bantuan sosial yang terkait dengan seksi Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan;
- h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan



i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Kenelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas: membantu Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi yang berhubungan dengan bidang pengembangan kenelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Untuk melaksanakan tugas Seksi Kenelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kenelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
- b. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Kenelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
- c. Pelaksanaan kegiatan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis bagi para nelayan dan Masyarakat Pesisir;
- d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan pengembangan dan informasi teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi aspek kenelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- f. Pelaksanaan penyusunan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial yang terkait dengan seksi Kenelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;

- g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan Seksi Kenelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikannya oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Sumber Daya Ikan mempunyai tugas :

membantu Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi yang berhubungan dengan bidang Sumber Daya Ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Sumber Daya Ikan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Sumber Daya Ikan;
- b. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Sumber Daya Ikan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dalam pelaksanaan kegiatan seksi Sumber Daya Ikan;
- d. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi asper Sumber Daya Ikan;
- f. Pelaksanaan penyusunan verifikasi, rekomendasi menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial yang terkait dengan seksi Sumber Daya Ikan;

- g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/ kegiatan yang berkaitan dengan Seksi Sumber Daya Ikan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Tugas Kepala Bidang Bina Usaha**

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan, membina dan mengkoordinasi kan peningkatan dan pengembangan kegiatan bina usaha budidaya perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas Dinas Kelautan dan Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi:<sup>20</sup>

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Bina Usaha;
2. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Bina Usaha.
3. Pengendalian penyusunan rencana pemanfaatan terhadap pengembangan potensi dan zona Bina Usaha;
4. Pengawasan penyiapan bahan kebijakan pemanfaatan dan pengembangan potensi Bina Usaha Perikanan;

---

<sup>20</sup> Rencana Strategis, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017-2022

5. Pengawasan pelaksanaan penyebarluasan informasi teknologi dan penyediaan sarana Bina Usaha;
  6. Pengendalian penyiapan bahan bimbingan kelembagaan dan pembinaan pengelolaan permodalan dan kerjasama usaha sesuai ketentuan dalam rangka optimalisasi kerja;
  7. Pengendalian pelaksanaan terhadap pengembangan potensi dan zona Bina Usaha sesuai ketentuan peraturan untuk kelancaran kerja;
  8. Pengawasan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kelompok usaha Kelautan dan Perikanan;
  9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang Bina Usaha; dan
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 1) Seksi Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produksi mempunyai tugas : membantu Kepala Bidang Bina Usaha dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produksi.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produksi mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produksi;
  - b. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produksi;

- c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, inventarisasi, identifikasi seksi Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produksi;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan diversifikasi produksi;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produksi;
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan seksi Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produksi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Kelembagaan dan SDM Perikanan mempunyai tugas :

membantu Kepala Bidang Bina Usaha dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan bidang kelembagaan dan SDM.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kelembagaan dan SDM Perikanan mempunyai tugas:

- a. Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Kelembagaan dan SDM Perikanan.
- b. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Kelembagaan dan SDM Perikanan;
- c. Pengelolaan data kelembagaan usaha perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Abdy

- d. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyiapan bahan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan dan SDM Perikanan;
- e. Pelaksanaan kegiatan Fasilitas peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Kelautan dan Perikanan;
- f. Pelaksanaan Fasilitas penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan ;
- g. Penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan dan kelembagaan usaha perikanan;
- h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan seksi Kelembagaan dan SDM Perikanan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.5. Teori Ekonomi Masyarakat

### 1. Pengertian Perekonomian Masyarakat

Peningkatan memiliki arti sebagai kemajuan, perubahan dan perbaikan. Sedangkan perekonomian mempunyai kata dasar “Oikos” yang artinya rumah tangga dan “Nomos” yang artinya aturan, maka ekonomi mengandung arti sebagai aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga.<sup>21</sup> Jadi, ekonomi merupakan ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, 2009. *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya : Putra Media Nusantara.



pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan).<sup>22</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan perekonomian adalah suatu perubahan atau perbaikan kondisi seseorang dari perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya. Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.<sup>23</sup> Yang dimaksud dari peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya.

Zulkarnain menerangkan bahwa ekonomi kerakyatan merupakan suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat.<sup>24</sup> Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan, yaitu: pendekatan kegiatan ekonomi dan pendekatan sistem ekonomi.

Pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Sedangkan pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem

---

<sup>22</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005. Jakarta : Balai Pustaka, hlm 220

<sup>23</sup> Arifin Noor,1997. Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU, Bandung : CV Pustaka Setia, hlm. 85

<sup>24</sup> Zulkarnain, 2003. Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, hlm. 98

pembangunan yang demokratis disebut pembangunan partisipatif (participatory development). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Pendekatan kedua ini, sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan merupakan sebuah perbaikan ekonomi suatu kelompok masyarakat yang mengalami perkembangan dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, dan keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh.

## 2. Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah perekonomian yang dimiliki oleh rakyat kecil dan didominasi oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi kerakyatan artinya mengembangkan sistem ekonomi yang mempunyai asas dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat artinya

---

<sup>25</sup> Fachri Yasin dkk, 2002. *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, Pekanbaru : Unri Perss, hlm. 2-3

meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasikan potensinya, atau memberdayakannya. Upaya penerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di sekitar rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Ada beberapa langkah atau strategi yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik yaitu:

- a) Melakukan identifikasi terhadap perilaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
- b) Melakukan program pembinaan terhadap pelaku ekonomi tersebut melalui program pendampingan.
- c) Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
- d) Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

---

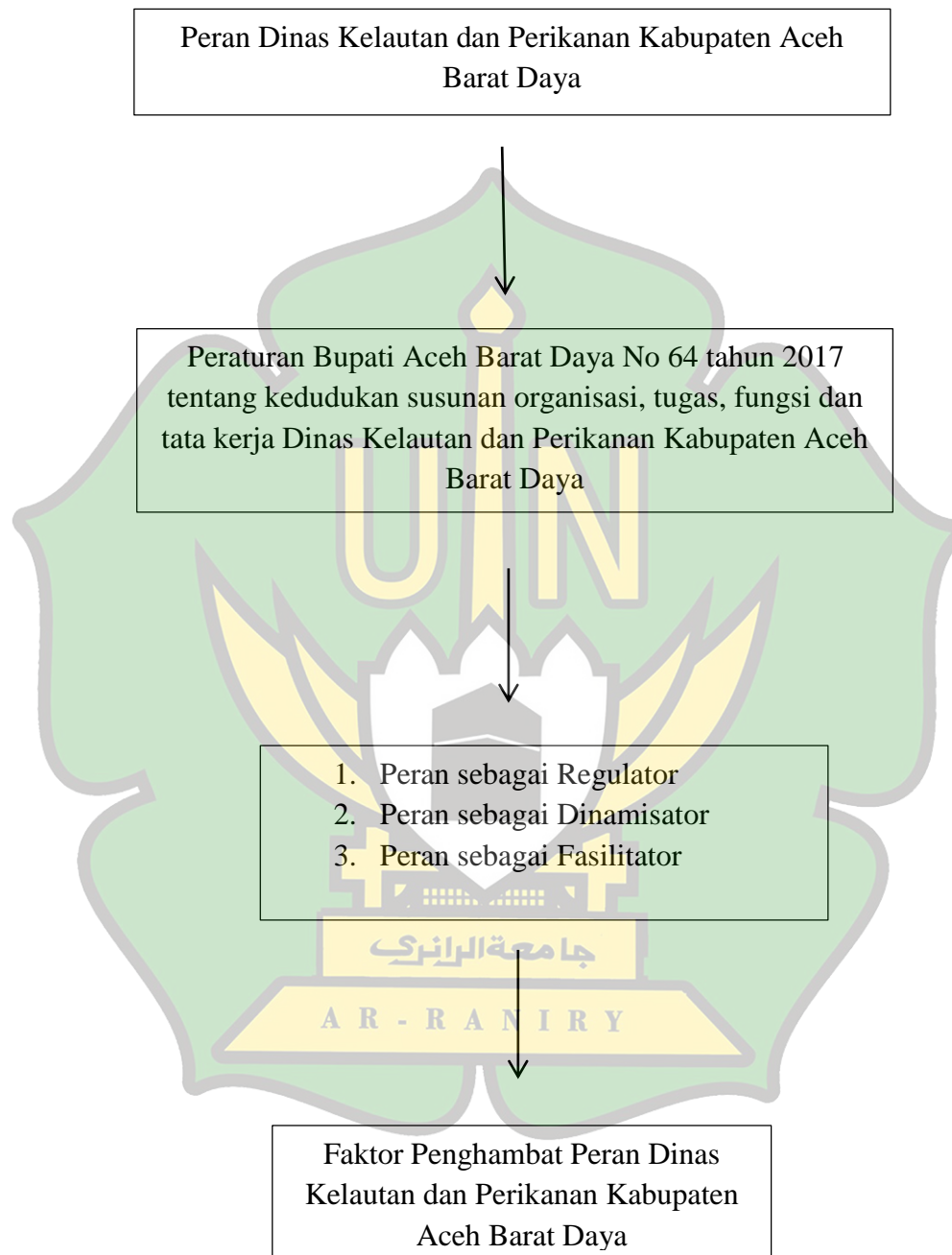
<sup>26</sup> Zulkarnain, 2003. Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, hlm. 9-10

- a) Menciptakan suasana yang mendorong potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya yang pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c) Mengembangkan ekonomi rakyat juga memiliki arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mubyarto, Ekonomi Rakyat, program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta : Aditya Media, 1997)

## 2.6. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka atau runtutan rencana penelitian yang digunakan agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitiannya. Menurut Sukardi, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam hal ini komponen yang membangun desain dapat mencakup semua struktur penelitian yang diawali sejak ditentukannya ide sampai memperoleh hasil penelitian.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Silaen, desain penelitian merupakan konsep ataupun gambaran mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan juga pelaksanaan penelitian.<sup>29</sup>

Jenis desain penelitian yang akan digunakan penulis adalah desain penelitian yang menggunakan metode studi kasus (*case study*) bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa suatu proses tertentu terkait fokus penelitian ini yaitu Peran Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga dapat menemukan korelasinya dalam variabel berikutnya yaitu Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan.

Menurut Susilo Rahardjo dan Gudnanto penelitian dengan menggunakan studi kasus adalah metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih

---

<sup>28</sup> Sukardi, 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm.183

<sup>29</sup> Silaen, Sofar. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor : In Media. Hlm.23



mendalam dan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif, langkah ini dilakukan untuk

memahami karakter individu atau objek penelitian secara mendalam.<sup>30</sup> Kemudian dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap suatu kejadian atau kasus dengan menggunakan metode yang sistematis ketika melakukan penelitian, mulai dari pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, hingga penarikan kesimpulan.

### 3.2. Definisi Operasional Variabel

Dalam rangka memudahkan proses analisis data yang diperoleh, maka definisi operasional yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain.

- A. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan yang dimaksud adalah upaya-upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan indikator peran, antara lain :
1. Peran sebagai Regulator
  2. Peran sebagai Dinamisator
  3. Peran sebagai Fasilitator
- B. Faktor yang menghambat peran yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menunjang perekonomian masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

---

<sup>30</sup> Rahardjo, Susilo dan Gudnanto, 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus : Nora Media Enterprise. Hlm.250

### 3.3. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang mendeskripsikan dan menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara sistematis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa perkataan, catatan dan dokumen. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, dokumen pribadi dan resmi, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainnya.<sup>31</sup>

Jenis penelitian ini digunakan agar dapat memberikan pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai keadaan dan fakta yang relevan dari Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya..

### 3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, gampong tersebut merupakan gampong yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, akan tetapi penghasilan yang didapat oleh masyarakat rendah karena minimnya pengetahuan tentang metode penangkapan ikan. Hal ini yang menjadi perhatian dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan perannya dalam memberikan pendampingan dan memfasilitasi masyarakat Gampong Padang Baru. Oleh karena itu penulis tertarik

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. hlm.3

untuk menjadikan Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai lokasi penelitian.

### 3.5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan suatu kebutuhan dalam proses penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berupa data yang berbentuk bukan angka.<sup>32</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a) Data Primer

Data primer, adalah data yang didapat langsung dari sumbernya. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara terbuka dengan subjek penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi (*representative*).<sup>33</sup> Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini (informan kunci) adalah:

**Tabel 1.1**

#### **Informan Kunci**

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Nama</b>
1.	Kepala Dinas	Chalid Hamdani, M.Sc.
2.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Heriadi, S.Pi,
3.	Kepala Bidang Bina Usaha	Drh. Safriati
4.	Masyarakat Nelayan	Syafruddin dan Samsul Bahri
5.	Pelaku Usaha Perikanan	Ilham
6.	Kepala PPI	Ari Gunawan, S.P
7.	Panglima Laot	Hasanuddin
<b>Jumlah</b>		8 orang

<sup>32</sup> Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama. hlm.284

<sup>33</sup> Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. hlm. 68

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian atau hasil kerja orang lain, bukan dari peneliti sendiri.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah proses melihat, mendengar, merasa dan mengamati objek penelitian tanpa melakukan wawancara. Menurut Usman dan Akbar observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>34</sup> Observasi memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan oleh subjek sehingga data yang didapat dari hasil observasi dapat dijadikan sumber data penelitian, karena melalui pengamatan dapat membentuk pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihak peneliti maupun dari pihak subjek.

Observasi dilakukan dengan cara mengamati Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keberhasilan pengumpulan data yang efektif. Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan kebutuhan data secara lengkap, kemudian dianalisis dan dideskripsikan seberapa jauh Dinas Kelautan Dan Perikanan sudah berperan dalam menunjang peningkatan

---

<sup>34</sup> Usman, Hundaeni dan P.S Akbar, 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara. hlm.54

ekonomi masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi kepada informan yang diteliti terkait pendapat dan keyakinannya.<sup>35</sup> Jenis wawancara yang digunakan berupa wawancara terstruktur atau wawancara formal terkait peran dinas kelautan dan perikanan dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Pemilihan informan atau partisipan yang ditentukan bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menggali informasi, karena informan yang telah ditentukan dianggap mampu memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia.<sup>36</sup> Dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan dapat berupa buku, *websites*, transkrip wawancara, gambar dan dokumen-dokumen lain terkait dengan Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Menunjang peningkatan ekonomi Masyarakat Nelayan di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

---

<sup>35</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.109

<sup>36</sup> Ibid, hlm.158

### 3.7. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini, diantaranya :

a) Reduksi data

Yaitu proses memilih dan merangkum data yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian terkait Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Menunjang peningkatan ekonomi Masyarakat Nelayan di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Reduksi data berfungsi untuk menggolongkan mana data yang perlu dan membuang atau yang tidak diperlukan, sehingga interpretasi bisa ditarik.

b) Penyajian data

Yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari *survey* dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Penyajian data yang bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan.

c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Yaitu melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian**

###### **1. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertugas untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekosentrasi di bidang Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya diuraikan sebagai berikut: Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya menyelenggarakan fungsi:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Rencana Strategis, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017-2022

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang kelautan dan perikanan;
- c. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, bidang usaha kelautan dan perikanan serta perikanan budidaya;
- e. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan meliputi pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan, usaha kelautan dan perikanan, perikanan budidaya serta UPT Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja dinas, dan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
  - a. Seksi Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan;
  - b. Seksi Kenelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
  - c. Seksi Sumberdaya Ikan.
4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya;
  - a. Seksi Produksi Budidaya
  - b. Seksi Pembenihan; dan

- c. Seksi Sarana dan Prasarana.
5. Bidang Bina Usaha;
  - a. Seksi Pembinaan Mutu dan Difersivikasi Produksi;
  - b. Seksi Pengembangan Usaha; dan
  - c. Seksi Kelembagaan dan SDM Perikanan
6. UPTD PPI Ujung Serangga
7. UPTD BBI Krueng Batee Dinas Kelautan dan Perikanan

#### **A. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya**

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk dapat memaksimalkan hasil yang akan dicapai dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017-2022 maka perlu menselaraskan dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Visi dari RPJMD Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor riil pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah serta memfasilitasi berdirinya lembaga keuangan syariah. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal, terdapat faktor pendorong dan penghambat. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengubah atau mempengaruhinya.

## **2. Profil Gampong Padang Baru**

### **A. Sejarah Gampong Padang Baru**

Nama Padang Baru memiliki sejarah unik tak ubahnya kisah nyata dan dapat dibuktikan dengan kasat mata tentang kebenaran faktanya sampai dengan saat ini, pada zaman dulu di Gampong Padang Baru pada waktu itu disebut dengan *Padang Baroe* hingga berubah nama menjadi Padang Baru disesuaikan dengan Ejaan EYD. Terdapat tanah yang luas dan datar yang dipenuhi dengan semak belukar pada saat penjajahan Belanda daerah ini sangat ditakuti parade (konvoi) Belanda dikarenakan lokasi ini yang masih dipenuhi dengan semak merupakan tempat bersembunyi pejuang – pejuang anak bangsa untuk mengusir penjajah Belanda.

Berdirinya Kontroler di Tapak Tuan maka pasukan tentara diaktifkan keinduk pasukannya. Dengan semangat kebersamaan Selebes Tudar Susoh (Datok Nyak Raja) memabat semak belukar tersebut dan menanamnya dengan bibit kelapa yang jumlahnya puluhan ribu batang. Untuk kesejahteraan warga

pada saat itu Datok Nyak Raja mendirikan sebuah tempat pengeringan kelapa cungkil (kopra) di Ujung Serangga. Setelah kering kelapa tersebut dikirim ke Sibolga (Sumut) termasuk juga pinang. Begitulah keakraban masyarakat dengan Datok Nyak Raja pada saat itu, sebelum Indonesia merdeka dan terbentuknya kepala Gampong Keadaan diatas didapat dari cerita orang tua zaman dahulu di gampong Padang Baru yang diceritakan secara turun-temurun oleh pelaku sejarah saat itu.

Legenda sejarah pembangunan Gampong Padang Baru diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman ratusan tahun yang lalu, gampong Padang Baru merupakan salah satu gampong yang terletak di kemukiman Seleumak Barat kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya yang berjarak 3 km dari pusat kecamatan. Luas wilayah gampong Padang Baru adalah  $\pm 110$  Ha, yang terbagi kedalam dua dusun yaitu teupin Bayu dan dusun teupin Bale dengan jumlah penduduk 157 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, sebagian kecil petani kebun dan yang lainnya berdagang dan sebagai pegawai di kantor pemerintahan.

#### **B. Sejarah Pemerintahan Gampong**

Sistem pemerintahan Gampong Padang Baru berasaskan kepada UU. No.11 Peraturan Pemerintah Aceh. Pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang Keuchik dan dibantu oleh perangkat adat lainnya.

#### **C. Keadaan Sosial Gampong**

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gampong Padang Baru masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, Nuansa



persaudaraan masih sangat kental dan bersahaja. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan bersama di Gampong, seperti kegiatan Hari Yatim dan Qurban bersama yang dilaksanakan setahun sekali dan kegotongroyongan yang masih digalakkan bersama-sama, musyawarah gampong yang ramai dihadiri oleh masyarakat, kepedulian terhadap warga yang terkena musibah dan keinginan membangun gampong yang didukung oleh semua masyarakat merupakan kondisi yang akan mendukung pembangunan gampong lebih cepat berkembang. Beberapa kegiatan sosial budaya yang dilakukan masyarakat gampong Padang Baru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**

**Jenis Kegiatan Sosial Yang Dilakukan Masyarakat**

No.	Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1.	Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gotong Royong</li> <li>▪ Olah Raga</li> <li>▪ Melayat Bersama</li> </ul>
2.	Perempuan/Ibu-Ibu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wirit Yasin</li> <li>▪ Kegiatan PKK</li> <li>▪ Kegiatan Posyandu</li> <li>▪ Majles Ta'lim</li> </ul>
3.	Laki-Laki/Bapak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengajian Tiap Malam Jum'at</li> <li>▪ Takziah</li> </ul>
4	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peringatan hari yatim</li> <li>▪ Qurban bersama</li> </ul>

*Sumber : Sekretariat Gampong Padang Baru, 2020*

**D. Letak dan Kondisi Geografis**

Gampong Padang Baru merupakan salah satu gampong yang terletak di kemukiman Pinang kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya yang berjarak 0 km dari pusat kecamatan. Luas wilayah gampong Padang Baru adalah  $\pm 110$



Ha, yang terbagi kedalam Tiga dusun yaitu Dusun Samudra dan dusun Bahagia dan Dusun Andalas dengan jumlah penduduk 2.730 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, Nelayan, sebagian kecil petani kebun dan yang lainnya berdagang dan sebagai pegawai di kantor pemerintahan.

a) Letak Geografis

Gampong Padang Baru termasuk dalam wilayah Kemukiman Pinang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Blang Barat Daya. Secara Administrasi dan geografis Gampong Padang Baru berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Cot Jirat
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong Pawoh
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Samudera India
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan gampong Pulau Kayu

b) Topografi

Secara umum keadaan topografi Gampong Padang Baru merupakan dataran rata yang tidak berbukit, dengan mayoritas lahan sebagai area persawahan dan perkebunan masyarakat serta laut. Masyarakat dominan bermata pencaharian tani dan berkebun dan juga nelayan dengan mayoritas topografi gampong areal persawahan dan berkebun. Ketinggian tanah lebih kurang 5 meter dari atas permukaan laut dengan suhu rata rata sedang.

c) Iklim Gampong

Gampong Padang Baru memiliki iklim tropis ( dua musim ) dimana rasio/perbandingan musim hujan dan musim kemarau merata dan memiliki curah hujan (intensitas) sedang.

d) Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan letak dan kondisi geografis maka potensi pengembangan wilayah di Gampong Padang Baru lebih mengarah kepada Pertanian dan kelautan, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan Hasil Panen Padi Sigupai dan nelayan.

**E. Kependudukan**

Jumlah penduduk Gampong Padang Baru sebesar 2.730 (jiwa) yang terdiri atas 896 laki- laki dan 1.834 perempuan dan 591 kepala keluarga,

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk berdasarkan Umum**

No	Nama Dusun	Kepala Keluarga (KK)	L	P	Jumlah Jiwa
1	<i>Dusun Samudra</i>	315	470	875	1.345
2	<i>Dusun Andalas</i>	114	183	348	531
3	<i>Dusun Bahagia</i>	324	243	611	854
<b>Total (Σ)</b>		<b>591</b>	<b>896</b>	<b>1.834</b>	<b>2.730</b>

Sumber : Sekretariat Gampong Padang Baru, 2020

**F. Struktur Usia**

Komposisi penduduk pada Tahun 2020 berdasarkan kelompok umur di Gampong Padang Baru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	28	31	59
5 – 9	63	147	210
10 – 14	30	52	82
15 – 19	35	62	97
20 – 24	42	150	192
25 – 29	136	203	339
30 – 34	86	287	373
35 – 39	52	113	165
40 – 44	79	253	332
45 – 49	62	103	165
50 – 54	103	136	239
55 – 59	62	71	133
60 – 64	27	109	136
65 – 69	77	67	144
70 – 74	5	33	38
75 +	9	17	26
<b>Jumlah</b>	<b>896</b>	<b>1.834</b>	<b>2.730</b>

Sumber : Sekretariat Gampong Padang Baru, 2020

### G. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat jenjang pendidikan masyarakat Gampong Padang Baru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD dan tidak Tamat SD	20	5	25
2	SLTP	50	15	65
3	SLTA	300	150	450
4	Diploma	10	10	20
5	Sarjana/Pasca Sarjana	50	30	80
<b>Jumlah</b>		<b>430</b>	<b>110</b>	<b>640</b>

Sumber : Sekretariat Gampong Padang Baru, 2020

## H. Jenis Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Gampong Padang Baru banyak bergerak di sektor Kelautan /perikanan dan pertanian, hal ini didukung oleh dekatnya dengan pesisir pantai dan TPI ujung serangga serta lahan peranian yang luas, baik lahan persawahan maupun lahan perkebunan.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah		Total
		Lk	Pr	
1	2	3	4	5
1	Sektor Pertanian			
	Petani	50	20	70
	Buruh Tani	0	0	0
	Pemilik Usaha Pertanian	5	7	12
2	Sektor Perkebunan			
	Buruh Perkebunan	0	0	0
	Karyawan Perusahaan Kebun	0	0	0
	Pemilik Usaha Kebun	7	3	10
3	Sektor Peternakan			
	Buruh Usaha Ternak	0	0	0
	Pemilik Usaha Ternak	4	0	4
4	Sektor Perikanan			
	Nelayan	208	0	208
	Pemilik Usaha Perikanan	11	3	14
	Buruh Usaha Perikanan	30	5	35
5	Sektor Industri Kecil dan RT			
	Montir/Bengkel	10	0	10
	Tukang kayu/Perabot	12	0	12
	Tukang Sumur	2	0	2
	Tukang Jahit	2	8	10

	Tukang kue	0	8	8
	Tukang Anyaman	0	0	0
	Tukang Rias	0	2	2
6	Sektor Industri Menengah dan besar			
	Karyawan Perusahaan swasta	5	3	8
	Karyawan Perusahaan pemerintah	0	0	0
	Pemilik Perusahaan	3	0	3
7	Sektor Perdagangan			
	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	3	0	3
	Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	0	0	0
8	Sektor Jasa			
	Pegawai Negeri Sipil	42	26	68
	TNI	5	0	5
	Polri	6	1	7
	Dukun Patah	0	0	0
	Dukun gampong	1	1	2
	Dukun Beranak	0	2	2
	Guru	15	30	45
	Guru Pengajian	5	4	9
	Dosen	1	0	1
	Pensiunan PNS	10	9	19
	Pensiunan TNI/Polri	3	0	3
	Pengacara	0	0	0
	Notaris	0	0	0
	Tidak Mempunyai Mata Pencaharian Tetap	70	30	100
	Jasa Penyewaan Alat Pelaminan	0	0	0
	<b>Total (Σ)</b>	<b>510</b>	<b>162</b>	<b>672</b>

Sumber : Sekretariat Gampong Padang Baru, 2020

## **I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **a) Pertumbuhan PDRB**

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah berdasarkan pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Untuk data pertumbuhan PDRB belum dapat dilakukan karena BPS belum menghitung angka pertumbuhan PDRB secara per gampong (paling kecil skala kecamatan).

### **b) Laju Inflasi**

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Untuk data Laju Inflasi belum dapat dilakukan karena BPS belum menghitung angka inflasi secara per gampong.

### **c) Pendapatan Regional Perkapita**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi regional untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Untuk data PDRB Perkapita belum dapat dilakukan karena BPS belum menghitung angka PDRB Perkapita secara per gampong.



## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1 Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Menunjang

#### Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan

Dengan melihat kondisi geografis Indonesia yang berstatus sebagai negara kepulauan dan daerah yang dikelilingi oleh pantai maka peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan sangatlah penting, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir pasal 63 yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintahan Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya”.<sup>38</sup>

Artinya, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir khususnya nelayan agar tingkat kesejahteraan kehidupannya menjadi lebih baik, sehingga di waktu berikutnya masyarakat memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri tanpa berharap adanya campur tangan pemerintah. Peningkatan ekonomi sendiri mempunyai sebuah proses dan tujuan. Proses peningkatan ekonomi pada umumnya adalah dengan membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir pasal 63

untuk melawan arus-arus globalisasi yang berubah sangat cepat. Sedangkan tujuannya, peningkatan ekonomi merujuk pada keadaan suatu hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya dan mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, peneliti menggunakan Teori Peran Pemerintah dengan 3 indikator yang dikemukakan oleh Yusuf dalam Lingga.<sup>39</sup>

#### **A. Peran sebagai Regulator**

Sebagai regulator, peran Dinas Kelautan dan Perikanan adalah menyiapkan arah agar terciptanya keseimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan, kemudian juga memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan. Regulasi diperlukan agar setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan dinas kelautan dan perikanan mempunyai pijakan hukum yang jelas, dan akan memudahkan segala pelaksanaan rencana kegiatan dikemudian harinya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat saat ini sudah menunjukkan perannya sebagai regulator, peran ini dapat dilihat dari penerbitan regulasi terkait peningkatan ekonomi masyarakat nelayan dengan tetap menjaga

---

<sup>39</sup> Lingga, Doriani. 2011. *Peranan Aparatur Pemerintah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Di Indonesia*.

sinkronisasi dengan aturan-aturan sebelumnya. Salah satu keseriusan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat Daya dalam menerbitkan regulasi mengenai peningkatan ekonomi masyarakat nelayan dapat dilihat dari visi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya yang berisi: Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor riil pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah serta memfasilitasi berdirinya lembaga keuangan syari'ah.<sup>40</sup>

Hal ini juga diperjelas oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, Bapak Chalid Hamdani menjelaskan bahwa:

Peran pemerintah dalam hal ini Dinas kelautan dan itukan salah satunya sebagai regulator, yaitu hanya untuk merangsang bukan untuk turun tangan langsung membantu masyarakat dalam menangkap ikan kan. Nah disini kami tugasnya membuat aturan –aturan yang mendukung masyarakat mensupport masyarakat dalam melaut. Nah untuk hal ini kalau dari segi regulasi langsung ya itu belum ada, kami hanya mengikut arahan dari provinsi. Jadi kami disini lebih ke aturan-aturan yang tidak langsung seperti tidak boleh mendarat di pelabuhan kabupaten, aturan penggunaan jaring, penangkapan kapal-kapal ukuran besar tangkapannya harus diatas wilayah jalur, nah seperti-seperti itu yang ada.<sup>41</sup> Mengenai hal ini Kepala PPI Ujong Serangga, Bapak Ari Gunawan juga memberikan pernyataan bahwa :

“kalau kami ini tugasnya mengeluarkan izin, urusan administrasi, surat-menyurat mengenai masuk-keluar kapal di pelabuhan, kalau aturan-aturan yang kami jalankan ini rata-rata itu aturan adat seperti tidak boleh melaut di hari jum'at kemudian mengenai jaring dan alat tangkap yang dilarang untuk dipakai dan semacamnya, sedangkan yang lain itu memang aturan yang sudah ada dari dinas, kami tinggal menjalankannya saja.”<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Rencana Strategis, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017-2022

<sup>41</sup> Wawancara dengan Chalid Hamdani, M.Sc, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, 10 Maret 2022.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ari Gunawan, S.P, Kepala PPI Ujong Serangga, Gampong Padang Baru, 12 Maret 2022

Kemudian Bapak Hasanuddin selaku Panglima Laot dalam wawancaranya dengan penulis menjelaskan bahwa:

“mengenai aturan-aturan melaut itu ada yang dari pemerintah ada yang dari aturan adat, karna kita disini di Aceh ada yang namanya Panglima Laot. Nah apa fungsinya, kami disini sebagai tetua adat yang mempunyai wewenang menjalankan hukum adat mengenai laut. Apa saja yang kami atur? Dari kapan saja boleh menangkap ikan, kapan tidak boleh menangkap, kalau tangkap ikan pakai alat apa, alat ini boleh tidak. Terus kami juga kalau ada permasalahan-permasalahan yang ada di laut atau diantara nelayan, kami yang selesaikan, kami yang dudukkan. Oh ini masalahnya berat, nanti kami kasih denda, kasih apa itu hukuman. Yang pastinya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam hukum adat laut. Kemudian kalau ada bantuan ataupun ada pemberitahuan dari dinas ataupun pemerintah itu biasanya ke kami dulu dikasih tau, kalau ada bantuan kepada siapa dikasih, itu mereka tanya sama saya, nanti saya yang memberi saran kepada siapa saja dikasih bantuannya, nelayan mana yang harus dibantu, yang seperti apa, apa saja persyaratannya, kira-kira apa yang dibutuhkan para nelayan, jadi kalau ada bantuan kita harapkan benar-benar yang memang bisa dipakai dan digunakan sesuai kemampuan nelayan sehingga bantuan itu pun bermanfaat dan nelayan juga merasa terbantu.”<sup>43</sup>

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya sudah melaksanakan perannya dengan baik, dapat dilihat dari adanya regulasi yang diterbitkan baik secara langsung maupun tidak langsung dan adanya koordinasi dengan unsur pemerintahan adat setempat yaitu Panglima Laot. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mensukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat nelayan khususnya di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Hasanuddin, Panglima Laot Lhok Kemukiman Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya 15 Maret 2022

## **B. Peran sebagai Dinamisator.**

Peran sebagai dinamisator yang dimaksud adalah menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi ketika menghadapi kendala-kendala yang terjadi di lapangan saat proses pembangunan berlangsung, hal ini dilakukan demi mendorong dan memelihara dinamika pembangunan khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan perannya sebagai dinamisator melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Pemberian bimbingan dapat diwujudkan dengan mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan yang difasilitasi oleh tim penyuluh ataupun badan tertentu sebagai mitra untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan ataupun pembinaan kepada masyarakat nelayan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan pembinaan kepada masyarakat nelayan berupa penyukuhan terkait peningkatan kualitas nelayan, kemudian pembinaan pengolahan hasil tangkap ikan, dan edukasi pemeliharaan barang-barang nelayan. Ada beberapa bentuk pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Chalid Hamdani selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, menyatakan bahwa:

“Kita itu setiap kita kasih bantuan barang, sarana dan prasarana itu gak Cuma kita kasih aja terus salaman selesai, itu kami kumpulkan, kami kasih tau cara menggunakannya, cara merawat barangnya agar tidak rusak, simpannya dimana. Jangan nanti kan mahal-mahal kita kasih



mesin kapal 3 bulan dipakai sudah rusak, kan rugi. Jadi sampai-sampai situ kita bilang. Kemudian kalau untuk para masyarakat yang punya usaha pengolahan ikan itu begitu juga, misalnya kemarin mereka pakai alat tradisional, nah kan kita fasilitasi kita kasih alat modern sekalian juga dengan kita bina, bagaimana cara pakainya, ini habis dipakai langsung dicuci dikeringkan biar tidak mudah rusak, nah gitu. <sup>44</sup>

Begitu pula dengan Bapak Heriadi Selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengatakan bahwa:

“Pelatihan ada, kalau dari sektor perikanan tangkap itu ada pelatihan tentang bagaimana cara membaca navigasi laut, terus ada juga bagaimana cara mereka bisa membaca arah daerah *fishing ground*, ciri-ciri *fishing ground*, kemudian juga ada pendampingan-pendampingan yang dilakukan secara kontinu di KUB (Kelompok Usaha Bersama)”.<sup>45</sup>

Hal serupa dinyatakan oleh Ibu Safriati selaku Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“Kalau untuk pembinaan dari Dinas Kelautan sendiri, untuk pengolahan ikan itu ada di bakso, itu ada marina bakso, terus ada juga kombet, bakso juga yang dibawah naungan Dinas Kelautan. Jadi memang sudah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Mereka sudah ada surat izinnya, surat izin tetangganya, sertifikat BPOM nya, udah bersertifikatlah istilahnya.”<sup>46</sup>

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Bapak Syafruddin yang merupakan nelayan aktif di Gampong Padang Baru, menyatakan sebagai berikut :

“Ada, bantuan itu ada diberikan. Kayak GPS itu untuk menentukan arah, terus alat untuk kita cari dimana banyak ikan berkumpul, nah ada itu. Biasanya nanti mereka ada ajarkan kita cara pakainya, nanti di tes satu-

<sup>44</sup> Wawancara dengan Chalid Hamdani, M.Sc, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, 10 Maret 2022.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Heriadi, S.Pi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, 08 Maret 2022.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Drh. Safriati, Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, 08 Maret 2022



satu coba baca ini, gimana cara bacanya, nah ini kalau seperti ini apa tandanya, sampai kita mengerti cara pakainya.”<sup>47</sup>

Hal yang sama juga dituturkan oleh Bapak Ilham selaku pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, mengatakan bahwa:

“Setelah dikasih alat-alat itu, mereka bilang cara pakainya, mereka ajarkan. Ada diajari itu mungkin ada beberapa hari disini, ditempat saya ini. Terus mereka ikut juga kontrol kita setelah kita pakai alat itu ada selama seminggu. Kemudian sekarang ada juga datang lihat-lihat sebulan atau dua bulan sekali, kadang ada jumpa dimana kan, lagi-lagi minum kopi di warung, ada ditanya-tanya bagaimana sekarang? Apa lancar? Begitu saja.”<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai dinamisator sudah cukup memadai, dapat dilihat dari pendampingan-pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat nelayan dan peningkatan kualitas nelayan agar meningkatkan jumlah hasil tangkapan para nelayan dan pengolahan hasil tangkapan yang lebih baik demi terwujudnya peningkatan ekonomi yang berdampak positif pada masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

### C. Peran sebagai Fasilitator.

Sebagai fasilitator peran Dinas Kelautan dan Perikanan adalah menciptakan suasana, situasi dan kondisi yang kondusif untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan

<sup>47</sup> Wawancara dengan Syafruddin, nelayan Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya 12 Maret 2022

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ilham, Pelaku Usaha Perikanan Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya 15 Maret 2022

masyarakat dalam bentuk pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang akan diberdayakan.

Salah satu bentuk peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya selaku fasilitator adalah dengan menjamin keselamatan nelayan ketika berlayar untuk mencari hasil tangkapan, memfasilitasi nelayan dengan pelatihan, pendidikan dan pembinaan demi meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam rangka menjamin keselamatan nelayan maka perahu ataupun kapal yang digunakan harus dinyatakan layak untuk berlayar, peralatan tangkap ikan juga harus layak pakai, dapat dipergunakan sesuai fungsinya, dan tidak melanggar aturan melaut, sumber daya manusia yang handal dan kompeten juga akan menjadi penentu meningkatnya ekonomi masyarakat nantinya. Maka pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan pelatihan dengan tujuan meningkatkan SDM (Sumber daya Manusia) agar dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.

Setiap tahunnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya mengadakan pelatihan ataupun pembinaan sebagai bentuk bimbingan secara teknis kepada para nelayan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat nelayan untuk

mendapatkan peningkatan hasil tangkapan, pengolahan hasil tangkapan yang berkualitas, pemeliharaan mesin kapal dan alat-alat tangkap.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan juga memberikan bantuan. Bantuan yang dimaksud adalah segala pemberian baik berupa materil ataupun moril dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kelompok nelayan yang sifatnya selektif dan tidak berkepanjangan dengan tujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bantuan yang telah diberikan berupa fasilitas yang dibutuhkan oleh nelayan seperti alat tangkap, baju pelampung, mesin kapal, *cool box* dan alat lainnya.



**Gambar 4.1**

**Bantuan Baju Pelampung Kepada Nelayan**

Sumber : Dokumentasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya



**Gambar 4.2**  
**Bantuan Cool Box Kepada Nelayan**

*Sumber : Dokumentasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya*

**Tabel 4.6**  
**Fasilitas Yang Diberikan Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kepada Nelayan**

No	Bentuk fasilitas	Fungsi	Jumlah
1	Para-para (ancak)	Alat untuk menjemur ikan	300 buah
2	Cool Box (alat penyimpanan dingin)	Wadah penyimpanan ikan pasca penangkapan	60 unit
3	Wadah perebusan	peralatan untuk perebusan ikan	18 buah
4	Baskom bak karet	Peralatan penunjang penanganan ikan	72 buah
5	Jaring	Peralatan tangkap ikan	50 unit
6	Mesin boat	Alat motorisasi kapal	35 unit
7	GPS (Navigasi Laut)	Peralatan penunjuk arah	50 unit
8	Baju Pelampung	Alat Pelindung nelayan	160 unit
9	Perahu Mesin	Alat Mobilisasi Nelayan	6 Unit
10	<i>Fish Finder</i>	Peralatan pendukung pencarian lokasi ikan	50 Unit

*Sumber : Dokumentasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya*



Dari Gambar dan tabel diatas dapat dilihat peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai fasilitator. Pemberian bantuan berupa materi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan, karena jika pendapatan nelayan meningkat maka tingkat kesejahteraan nelayan pun akan meningkat. Kendati pemberian bantuan belum tersalurkan secara menyeluruh, tapi bantuan yang diberikan ini sangat membantu para nelayan dalam meningkatkan perekonomiannya.

Bapak Chalid Hamdani menyatakan bahwa :

“Setiap bantuan yang diberikan ini sudah tiga tahun, sudah 2020-2021 rata-rata yang kami bantu itu alat tangkap ikan itu ada jaring, ada *cool box* itu namanya ya, pendingin ikan terus ada alat bantu GPS untuk menentukan arah dan *fish finder* itu pelacak ikan kemudian ada juga mesin robin”.<sup>49</sup>

Hal ini juga dituturkan oleh Bapak Heriadi Selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap yang mengatakan bahwa :

“Yang kita sentuh juga itu penjualan ikan, itu ada mugee (penjual ikan) yang kita sasar itu pedagang ikan yang memang proses transaksionalnya itu memang ambil ikan bawa ke kampung-kampung, itu kita fasilitasi juga ada juga yang pedagang roda dua kayak motor itu juga ada kita bantu, rata-rata mereka kan pake keranjang biasa, jadi kan daya tahan ikannya kurang, cepat busuk. Makanya kita berikan fasilitas ada *fiber*, mereka bisa isi ikan, isi es dan daya tahan ikannya lebih bagus.”<sup>50</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya

<sup>49</sup> Wawancara dengan Chalid Hamdani, M.Sc, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, 10 Maret 2022.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Heriadi, S.Pi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, 08 Maret 2022.

Ikan dan Petambak Garam. Hal itu diwujudkan melalui Program Bina Usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya. Bentuk pembinaan usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah berupa pembinaan usaha yang diikuti oleh seluruh masyarakat nelayan yang berkeinginan untuk mengolah dan membangun usaha dari hasil tangkapan ikannya.

Dari berbagai informasi diatas dapat kita simpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan perannya sebagai fasilitator dengan mengadakan berbagai upaya demi menunjang peningkatan ekonomi masyarakat nelayan khususnya di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

#### **4.2.2 Faktor Penghambat Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menjalankan perannya tentu menghadapi banyak kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan peningkatan ekonomi masyarakat nelayan baik dari segi pendukung maupun penghambat. Berikut kendala yang dihadapi dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan perannya, antara lain :

##### **A. *Corona Virus Disease (Covid-19)***

Pandemi yang menyerang Indonesia 2 tahun belakangan ini sangat mempengaruhi segala aktivitas masyarakat. Begitu pula dengan kegiatan dinas kelautan dan perikanan dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat



nelayan khususnya di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Kondisi pandemi membuat segala aktivitas yang berhubungan dengan publik di minimalisir bahkan ada beberapa kegiatan yang harus dihentikan pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan perannya sebagai dinamisator, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya banyak membuat program pendampingan masyarakat dalam bidang usaha yang mengharuskan adanya perkumpulan-perkumpulan, dan hal itu tidak bisa direalisasikan karena kondisi pandemi yang sedang berlangsung. Sehingga banyak program yang terbengkalai ketika pengadaan alat sudah rampung dan siap untuk dilaksanakan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Chalid Hamdani selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, bahwa:

“Kalau sekarang alasan yang dilihat kan covid, jadi kalau pelatihan itu terbatas ya. Di tahun 2021 memang tidak ada pelatihan-pelatihan kalau untuk pembinaan. Kalau sebelum-sebelumnya ada. Cuma karena ini sekarang lagi covid, dari dana juga tidak tersedia karna akan lebih dianggarkan untuk kasus covid ini dulu kan, fokus kesitu. Jadi dana pun terbatas, tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh sering-sering melakukan aktivitas tatap muka, kemudian jumlah orang di satu tempat juga dibatasi, jadi susah kalau untuk kita melakukan pelatihan. Jatahnya mungkin bisa 40 orang, karna covid hanya bisa 20 orang, harus buat pelatihan lain lagi untuk 20 orang yang belum ikut, maka perlu ada dana lagi. Jadi tidak dilaksanakan mengingat kalau tidak dilaksanakan target sasarannya dan hasilnya tidak maksimal.”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Chalid Hamdani, M.Sc, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, 10 Maret 2022

Hal ini juga senada yang dikatakan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, Ibu Safriati dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut :

“Untuk tahun 2021 ini kalau pelatihan tidak ada, yang ada hanya pendampingan. Kalau bantuan ada dari segi sarana dan prasarana. Bentuk bantuan untuk pengolahan, dan itu juga bukan di tahun 2021, tapi di 2020. Di tahun 2021 ada memang pengajuan dari KKP (kementrian kelautan dan perikanan) itu memang ada jenis kemasan produk, bentuk bantuannya. Tapi, syarat yang mereka ajukan ke kita itu memang harus yang sudah mempunyai sertifikat. Otomatis yang bisa mendapatkan itu ya pihak marina dan kombet, tapi merekapun tidak mengajukan. Alasan tidak mengajukan pun karena mereka tidak membutuhkan bentuk kemasan produk yang ditawarkan, karena pun mereka punya stok yang sangat banyak untuk kemasannya, sehingga gak diajukan.”<sup>52</sup>

Hal ini dikonfirmasi dengan pernyataan Bapak Samsul Bahri, salah satu nelayan di Gampong Padang Baru, dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut :

“Kalau pelatihan gaada, gak pernah dibuat ataupun dibilang ada pelatihan siapa mau ikut itu gaada, memang gaada sekarang. Kalau dulu-dulu ada. Mungkin karna apa itu, virus itu yang disuruh kita pakai-pakai masker, tidak boleh kumpul-kumpuljadi gaada dibuat.”<sup>53</sup>

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pandemi covid-19 sangat mempengaruhi peran dinas kelautan dan perikanan kabupaten aceh barat daya dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Drh. Safriati, Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, 08 Maret 2022

<sup>53</sup> Wawancara dengan Samsul Bahri, masyarakat nelayan Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya 12 Maret 2022

## **B. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas Sumber Daya Manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria pengetahuan dan keterampilan. Manusia merupakan pelaku, pelaksana dan penikmat pembangunan, kualitas sumber daya manusia yang rendah akan memposisikan manusia sebagai pemakai/ penikmat fasilitas saja dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Hal ini di sebabkan oleh perkembangan arus informasi dan teknologi yang semakin pesat dan menuntut manusia agar mampu mengolah informasi dan memanfaatkan teknologi. Tujuan pesatnya teknologi adalah untuk memudahkan manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Ada banyak aspek yang menjadi acuan untuk melihat sejauh mana Kualitas Sumber Daya Manusia, mulai dari aspek sikap, mental, perilaku dan kemampuan. Seluruh aspek tersebut merupakan potensi yang terdapat di masing-masing individu. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangat penting dalam pembangunan. Salah satu indikator kualitas Sumber Daya adalah tingkat pendidikan. Namun tingginya kualitas pendidikan tidak serta merta dapat menjamin kualitas sumber daya manusia tersebut, maka dari itu kualitas SDM juga dapat dilihat dari apa yang dihasilkannya. Hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat itu sendiri serta pemerintah akan pentingnya meningkatkan kualitas SDM-nya, karena hal tersebut merupakan faktor yang sangat menentukan dalam upaya menciptakan pembangunan yang lebih mantap dan maju. Tanpa sumber daya manusia yang baik tidak mungkin suatu bangsa bisa berkembang dan mampu bersaing.

Kualitas sumber daya manusia di Gampong Padang Baru sangat rendah dikarenakan tingkat pendidikan nelayan pada umumnya adalah SD atau SMP bahkan tidak tamat Sekolah Dasar dan tidak menempuh pendidikan sama sekali, pengetahuan tentang cara menangkap ikan hanya didapatkan berdasarkan pengalaman dan belajar langsung di lapangan.

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Bapak Chalid Hamdani yang mengatakan bahwa:

“Nelayan kita rata-rata cuma tamat SD bahkan ada yg tidak pernah sekolah sehingga kemampuan mereka terbatas, mereka melaut itu otodidak, lihat orang melaut, tangkap ikan nah mereka ikuti, kalau salah ya diwariskan kesalahan itu, kalau benar ya alhamdulillah, Cuma kan banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, apalagi masalah pengelolaan keuangan, memang ada yang bisa dia kelola, tapi ada juga yang pas dapat banyak ini hari ini langsung dia foya-foya, beli ini beli itu menyenangkan diri, bukan tidak boleh, tetapi kan disisihkan dulu untuk keperluan sehari-hari, keperluan darurat, keperluan untuk digunakan dikemudian hari, inilah salah satu yang menghambat kami dalam memberdayakan nelayan karena upaya yang kami lakukan tidak serta merta dapat langsung diserap dan diterima oleh nelayan karena terkendala dengan SDM nelayan itu sendiri”.<sup>54</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Safriati selaku Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menyatakan:

“Misalnya kita sudah memberikan bantuan, mereka tidak gunakan bantuan itu. seperti yang di PUGAR (Kelompok Petani Petambak Garam) itukan bantuan yang diberikan sesuai dengan teknologi sekarang dengan harapan meningkatkan hasil produksi, sehingga kesimpulan akhirnya juga untuk peningkatan perkonomian, seperti jambo itu, jadi nanti tidak menggunakan jambo tradisional, cara masaknya itu juga nanti tidak menggunakan cara tradisional tetapi menggunakan teknologi yang sesuai dengan jaman sekarang, tetapi mereka enggan untuk menggunakan itu karna mereka sudah terlalu nyaman dengan cara tradisional mereka. Padahal karna mereka gak mau mencoba yang disini jadi apa yang kita berikan itu sia-sia dan

<sup>54</sup> Wawancara dengan Chalid Hamdani, M.Sc, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, 10 Maret 2022

terbengkalai, padahal sudah diberikan pembinaan cara pakainya, didampingi tetapi ya begitu mereka enggan untuk melakukan perubahan. Jadi itu motivasi dari mereka sendiri mungkin ya, kalau kita sudah memberi bantuan ini itu, pelatihan pembinaan pendampingan, kalau dari mereka sendiri tidak tergerak untuk melakukannya ya tidak akan jalan. Jadi hambatan di kami, kami tidak bisa memotivasi mereka, dan mereka enggan untuk memotivasi diri mereka sendiri. Jadi kembali ke SDM nya, walaupun sudah coba dibina dengan diberikan sarana dan prasarana, dibina lagi tapi mereka tetap tidak mau, gatau jugalah itu ya gimana caranya, nah itu juga menjadi PR buat kami agar tetap berusaha dan berupaya untuk memotivasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka.”<sup>55</sup>

Sedangkan dari sisi kapasitas sumber daya manusia di Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, SDM yang ada juga sangat terbatas, dengan keadaan tersebut tentunya sulit untuk mengakomodasi kebutuhan dan mengatasi permasalahan nelayan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan memerlukan bantuan pihak ketiga demi mempercepat penyelesaian tugas.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas menggambarkan bahwa nelayan diketahui belum mampu memanfaatkan sistem teknologi perikanan yang sudah disosialisasikan. Padahal jika para nelayan bisa memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan akan sangat berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Tentu hal ini menjadi tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya agar lebih sering melakukan kegiatan penyuluhan dan mencari metode pendekatan seperti apa yang dibutuhkan para nelayan agar lebih cepat menerima ilmu yang diajarkan sehingga dapat menghasilkan produksi yang berkualitas dan manfaatnya dapat dirasakan oleh para nelayan.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Drh. Safriati, Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, 08 Maret 2022



Oleh karena itu kualitas Sumber Daya manusia dari Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu menunjang perkembangan perikanan khususnya di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai perkembangan perikanan dijamin memberikan dampak positif bagi masyarakat nelayan.

### C. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan karena anggaran merupakan faktor penggerak kelancaran seluruh kegiatan elemen-elemen lembaga pemerintahan. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan klasik, dan program tidak dapat berjalan dengan baik jika belum memenuhi kebutuhan nelayan.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Safriati selaku Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, menyatakan bahwa:

“Kalau untuk hambatan peningkatan perekonomian kan sebenarnya kita permodalan ya, anggaran terbatas lah bahasanya. Semua orang pasti, kelompok-kelompok itu pasti maslaanya di permodalan memang. Maksudnya selain bantuan sarana dan prasarana kemudia pelatihan, mereka kan harusnya mendapatkan juga bantuan permodalan, istilahnya estafet. Jadi programnya gak berhenti sampai pelatihan dan pemberian sarana dan prasarana tapi juga dibeikan bantuan modal untuk menggerakkan programnya sehingga programnya berkelanjutan. Jadi dari pemberian dana itu mereka bisa membuka usaha, ataupun meningkatkan permodalan mereka jika mereka sudah ada usaha terlebih dahulu, dan untuk seterusnya kan pendampingan secara kontinu, itu salah satu hambatan sebenarnya. Apalagi kalau pendampingan, mendapatkan permodalan dari kelembagaan khusus yang mengayomi tentang perikanan dan segala macam itu kan juga tidak semuanya tersampaikan ke masyarakat.”<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Drh. Safriati, Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, 08 Maret 2022



Bapak Samsul Bahri selaku nelayan Gampong Padang Baru yang sudah menekuni profesi nelayan selama 10 tahun mengatakan bahwa:

“Kalau bantuan itu ada dikasih, ada jaring, baju pelampung kadang ada mesin boat, bahkan sama boat-boat nya dikasih. Cuma, kadang dikasih itu bukan kekita, bukan ke nelayan yang membutuhkan. Tapi kadang asik orang itu-itu aja yang dapat, malah kadang ada yang dapat itu dia bukan nelayan, untuk apa coba dikasih ke dia. Nah, dia gak pake itu fasilitas, terus dia jual dapatlah uang.”<sup>57</sup>

Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Syafruddin selaku nelayan Gampong Padang Baru mengatakan bahwa:

“Tapi bantuan itu diberikan dengan syarat kelompok, jadi satu kelompok ada 10 orang nanti dikasih komputer satu atau robin. Jadi kadang orang ni kan buat kelompok biar ada dapat bantuan aja, jadi nanti pas dikasih ada yang dapat ada yang enggak. Jadi nanti pas bantuannya jarring segini orang-orang ini yang dpaat, besok kalo bantuannya pelampung orang lain lagi yang dapat gitu. Cuma kadang di lapangan ga begitu, siapa duluan ambil, karna orang dinas kan taunya udah dikasih ke kelompok, nah orang kelompok ini yang bagi kan. Kadang ada yang udah dapat dia bilang belum dia ambil lagi. Nah gitu, karna kan syarat dapat bantuan itu harus berkelompok dia gak bisa sendiri-sendiri kita, susah.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan dana yang dianggarkan dalam program-program peningkatan ekonomi masyarakat nelayan belum dapat mengatasi permasalahan nelayan. Hal ini dikarenakan setiap ada pemberian bantuan, bantuan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian nelayan. Padahal anggaran yang cukup merupakan salah satu pendorong program peningkatan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Kekurangan dana akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan program peningkatan ekonomi karena bantuan yang diberikan tidak dapat menjangkau semua nelayan, dengan keadaan seperti itu program-

<sup>57</sup> Wawancara dengan Samsul Bahri, masyarakat nelayan Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya 12 Maret 2022

<sup>58</sup> Wawancara dengan Syafruddin, masyarakat nelayan Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya 12 Maret 2022

program yang telah dilaksanakan tidak menyasar penerima manfaat dengan efektif.

Pemberian barang siap pakai ini pun juga tidak merata karena hanya sebagian kecil dari kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan tersebut sedangkan kalau mau di lihat dengan dengan begitu banyak anggota kelompok nelayan yang membutuhkan, hal demikian begini yang merusak kesatuan satu kelompok karena pasti akan muncul kecemburuan sosial antara anggota kelompok nelayan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya telah berjalan dengan baik. Peran tersebut dapat diukur melalui 3 indikator peran yaitu, peran sebagai regulator, peran sebagai dinamisator dan peran sebagai fasilitator. Hal ini dapat dilihat dari adanya hukum adat atau regulasi tidak langsung yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Panglima Laot sebagai mitra kerja dari pemerintah, pemberdayaan masyarakat nelayan, penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung jalannya usaha dan sejumlah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru sangat terbantu dan ekonomi masyarakatpun meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Faktor penghambat Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya ada tiga kendala yaitu, pandemi covid-19, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran.

## 5.2 Saran

1. Untuk pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masyarakat nelayan dengan meningkatkan kegiatan pemberdayaan nelayan. Serta pemerintah disarankan untuk menindak lanjuti setiap bentuk kegiatan peningkatan ekonomi yang telah diprogramkan khususnya dalam pemberian bantuan modal usaha dan alat tangkap agar program bisa berjalan secara berkelanjutan dan tidak hanya sampai pada proses pemberian tetapi sampai pada proses evaluasi hasil sehingga program yang dijalankan tepat sasaran dan tepat guna.
2. Untuk masyarakat nelayan yang ada di Gampong Padang Baru yang telah menerima bantuan program pemberdayaan tersebut, agar lebih memperhatikan lagi ketentuan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan tersebut secara efektif yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arifin Noor, (1997). Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Basrowi dan Suwandi, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fachri Yasin dkk, (2002). *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, Pekanbaru : Unri Perss.
- Hasibuan, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ismail Nawawi, (2009). *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kusnadi, (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Lexy J. Moleong, (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Lingga, Doriani. (2011). *Peranan Aparatur Pemerintah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rahardjo, Susilo dan Gudnanto, (2011). *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus : Nora Media Enterprise.
- Rernawan, Erni, (2011). *Budaya Organisasi Dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Silaen, Sofar. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor : In Media.
- Soejono Soekanto, (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sukardi, (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sukirno Sadono, (2016). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada



Tresina Novita dan Dua dji Noverman, (2017). *Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pengembangan Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media.

Usman, Hundaeni dan P.S Akbar, (2003). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

Zulkarnain, (2003). *Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.

#### **Undang-Undang :**

Rencana Strategis, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017-2022.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong.

Qanun No.10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

#### **Jurnal/ Skripsi :**

Hamdan, 2017 “Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Jepara dalam upaya Peningkatan Pendapatan Pesisir”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Di Ponogoro Semarang.

Kaswandi, 2017 “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar” Jurnal Universitas Hsanidin Nakassar.

Nikijuluw Victor, 2001. *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Peisisir Secara Terpadu*. Bogor: IPB Bogor.

Nurfadhillah T, 2016. “Peran Masyarakat Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Gampong Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Madar”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

#### **Website :**

Dokumen RZWP3K Aceh\_171018\_Non Komentar.

Penyediaan es terbatas. nelayan abdy mengeluh, diakses pada <https://www.ajnn.net/news/penyediaan-es-terbatas-nelayan-abdy-mengeluh/index.html>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2021. pukul: 0:19.

PPI ujong serangga abdy tak terawat. diakses pada <https://waspada.id/aceh/ppi-ujong-serangga-abdy-tak-terawat/> diakses pada tanggal 22 Maret 2021. Pukul : 0:21.



**LAMPIRAN**



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 1508/Un.08/FISIP/Kp.07.6/07/2021

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 08 Juli 2021
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara  
1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama  
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. Sebagai pembimbing kedua  
Untuk membimbing skripsi  
Nama : Fachrul Razy  
NIM : 160802107  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Menunjang Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Desa Padang Baru Susoh)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 21 Juli 2021

An. Rektor  
Dekan



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0012/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/01/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FACHRUL RAZY / 160802107**

Semester/Jurusan : XI / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Lampedaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN (Studi Kasus di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kab. Aceh Barat Daya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Januari 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 25 Juli 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Letkol BB. Djalal Komplek Cemara Indah, Padang Baru – Kecamatan Susoh 23765  
email : dislutkan\_abdya@yahoo.co.id

Susoh, 23 Februari 2022 M  
22 Rajab 1443 H

Nomor : 523/185  
Lampiran : -  
Perihal : Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya

Yang Terhormat :  
Dekan FISIP UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh  
Di –  
Tempat.

Sehubungan dengan surat Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh Program Studi Ilmu Administrasi Negara di UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: B-0012/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/01/2022 tanggal 05 Januari 2022, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FACHRUL RAZY  
NIM : 160802107  
Judul : Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan.  
Lokasi Penelitian : Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Benar yang namanya tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data dalam rangka penyusunan Skripsi di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya mulai tanggal 02 s/d 22 Februari 2022.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

(W.Pj. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya,



GHALID HARDANI, S.Pi., M.Sc  
Pembina  
NIP. 19781215 200904 1 002

## **Instrumen Wawancara**

### **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya**

1. Bagaimana potensi laut dan perikanan di Gampong Padang Baru?
2. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat nelayan desa?
3. Apa saja upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menunjang ekonomi masyarakat nelayan?
4. Apa saja kebijakan dari DKP yg berhubungan dengan menunjang ekonomi nelayan?
5. Apakah ada regulasi khusus yg diterbitkan terkait dengan menunjang ekonomi nelayan?
6. Peranan seperti apakah yg sudah dilakukan DKP terkait dengan ekonomi nelayan ?
7. Apakah ada bantuan permodalan ataupun sebagainya kepada nelayan?
8. Apakah ada pengadaan fasilitas yang mendukung kerja nelayan?
9. Bagaimana tanggapan anda mengenai fasilitas yg sudah diadakan tapi terbengkalai?
10. Apakah ada edukasi kepada nelayan tentang bagaimana cara pemanfaatan fasilitas tersebut?
11. Mengapa fasilitas-fasilitas tersebut terbengkalai?
12. Apakah dinas sudah memfasilitasi pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan?
13. Apakah ada penyuluhan dari DKP kepada masyarakat nelayan?
14. Apakah ada pelatihan kepada masyarakat nelayan mengenai cara mengolah hasil tangkapan ?
15. Apakah ada peran dari DKP terkait meningkatkan pengetahuan masyarakat nelayan yg berkaitan dengan penunjang ekonomi masyarakat nelayan?
16. Bentuk Keterampilan Seperti Apa Yang Diselenggarakan Dinas Kelautan Dan Perikanan?

17. Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat nelayan setelah mendapatkan bantuan atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan DKP?
18. Siapa Saja *Stakeholders* Yang Berperan Dalam Menunjang Ekonomi Masyarakat Nelayan ?
19. Apakah Semua Program/Kebijakan Yang Diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Berjalan Sesuai Harapan?
20. Faktor Apa Saja Yang Mendukung Dan Menghambat Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Menunjang Ekonomi Masyarakat Nelayan ?
21. Apa saran dan harapan anda untuk perekonomian masyarakat nelayan kedepannya?

#### **Kepala Bidang Perikanan Tangkap**

1. Bagaimana potensi laut dan perikanan di desa padang baru?
2. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat nelayan desa?
3. Apa saja upaya dinas kelautan dan perikanan dalam menunjang ekonomi masyarakat nelayan?
4. Apa saja kebijakan dari DKP yg berhubungan dengan menunjang ekonomi nelayan?
5. Apakah ada regulasi khusus yg diterbitkan terkait dengan menunjang ekonomi nelayan?
6. Peranan seperti apakah yg sudah dilakukan DKP terkait dengan ekonomi nelayan ?
7. Apakah ada bantuan permodalan ataupun sebagainya kepada nelayan?
8. Apakah ada pengadaan fasilitas yang mendukung kerja nelayan?
9. Bagaimana tanggapan anda mengenai fasilitas yg sudah diadakan tapi terbengkalai?
10. Apakah ada edukasi kepada nelayan tentang bagaimana cara pemanfaatan fasilitas tersebut?
11. Mengapa fasilitas-fasilitas tersebut terbengkalai?



12. Apakah dinas sudah memfasilitasi pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan?
13. Apakah ada penyuluhan dari DKP kepada masyarakat nelayan?
14. Apakah ada pelatihan kepada masyarakat nelayan mengenai cara mengolah hasil tangkapan ?
15. Apakah ada peran dari DKP terkait meningkatkan pengetahuan masyarakat nelayan yg berkaitan dengan penunjang ekonomi masyarakat nelayan?
16. Bentuk Keterampilan Seperti Apa Yang Diselenggarakan Dinas Kelautan Dan Perikanan?
17. Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat nelayan setelah mendapatkan bantuan atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan DKP?
18. Siapa Saja *Stakeholders* Yang Berperan Dalam Menunjang Ekonomi Masyarakat Nelayan ?
19. Apakah Semua Program/Kebijakan Yang Diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Berjalan Sesuai Harapan?
20. Faktor Apa Saja Yang Mendukung Dan Menghambat Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Menunjang Ekonomi Masyarakat Nelayan ?
21. Apa saran dan harapan anda untuk perekonomian masyarakat nelayan kedepannya?

#### **Kepala Bidang Bina Usaha**

1. Bagaimana potensi laut dan perikanan di desa padang baru?
2. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat nelayan desa?
3. Apa saja upaya dinas kelautan dan perikanan dalam menunjang ekonomi masyarakat nelayan?
4. Apa saja kebijakan dari DKP yg berhubungan dengan menunjang ekonomi nelayan?

5. Apakah ada regulasi khusus yg diterbitkan terkait dengan menunjang ekonomi nelayan?
6. Peranan seperti apakah yg sudah dilakukan DKP terkait dengan ekonomi nelayan ?
7. Apakah ada bantuan permodalan ataupun sebagainya kepada nelayan?
8. Apakah ada pengadaan fasilitas yang mendukung kerja nelayan?
9. Bagaimana tanggapan anda mengenai fasilitas yg sudah diadakan tapi terbengkalai?
10. Apakah ada edukasi kepada nelayan tentang bagaimana cara pemanfaatan fasilitas tersebut?
11. Mengapa fasilitas-fasilitas tersebut terbengkalai?
12. Apakah dinas sudah memfasilitasi pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan?
13. Apakah ada penyuluhan dari DKP kepada masyarakat nelayan?
14. Apakah ada pelatihan kepada masyarakat nelayan mengenai cara mengolah hasil tangkapan ?
15. Apakah ada peran dari DKP terkait meningkatkan pengetahuan masyarakat nelayan yg berkaitan dengan penunjang ekonomi masyarakat nelayan?
16. Bentuk Keterampilan Seperti Apa Yang Diselenggarakan Dinas Kelautan Dan Perikanan?
17. Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat nelayan setelah mendapatkan bantuan atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan DKP?
18. Siapa Saja *Stakeholders* Yang Berperan Dalam Menunjang Ekonomi Masyarakat Nelayan ?
19. Apakah Semua Program/Kebijakan Yang Diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Berjalan Sesuai Harapan?
20. Faktor Apa Saja Yang Mendukung Dan Menghambat Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Menunjang Ekonomi Masyarakat Nelayan ?
21. Apa saran dan harapan anda untuk perekonomian masyarakat nelayan kedepannya

## Nelayan

1. Apakah ada bantuan permodalan ataupun sebagainya kepada nelayan?
2. Apakah ada pengadaan fasilitas yang mendukung kerja nelayan?
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai fasilitas yg sudah diadakan tapi terbengkalai?
4. Apakah ada edukasi kepada nelayan tentang bagaimana cara pemanfaatan fasilitas tersebut?
5. Mengapa fasilitas-fasilitas tersebut terbengkalai?
6. Apakah dinas sudah memfasilitasi pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan?
7. Apakah ada penyuluhan dari DKP kepada masyarakat nelayan?
8. Apakah ada pelatihan kepada masyarakat nelayan mengenai cara mengolah hasil tangkapan ?
9. Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan ataupun penyuluhan tersebut?
10. Apa yang didapatkan dari pelatihan dan penyuluhan tersebut?
11. Apa perubahan yang bapak rasakan setelah mengikuti pelatihan atau penyuluhan tersebut?
12. Bentuk Keterampilan Seperti Apa Yang Diselenggarakan Dinas Kelautan Dan Perikanan?
13. Perubahan apa yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan DKP?
14. Apakah bantuan ataupun pengetahuan yang didapatkan saat pelatihan diterapkan saat ini?
15. Apakah pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan para nelayan saat ini?
16. Apakah dengan mendapatkan bantuan permodalan ataupun pelatihan berdampak pada penghasilan bapak sebagai nelayan?
17. Apakah ada keluhan yang ingin bapak sampaikan?
18. Apa saja masalah yang terjadi di lapangan saat melaut?

19. Apakah kiranya ada yang hal-hal yang harus dipenuhi DKP untuk menunjang aktivitas nelayan ?
20. Apa saran dan harapan anda untuk perekonomian masyarakat nelayan kedepannya?

### **Panglima Laot**

1. Bagaimana potensi laut dan perikanan di Gampong Padang Baru?
2. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat nelayan desa?
3. Apa saja upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menunjang ekonomi masyarakat nelayan?
4. Apakah ada regulasi khusus yg diterbitkan terkait dengan menunjang ekonomi nelayan?
5. Peranan seperti apakah yg sudah dilakukan DKP terkait dengan ekonomi nelayan ?
6. Apakah ada bantuan permodalan ataupun sebagainya kepada nelayan?
7. Apakah ada pengadaan fasilitas yang mendukung kerja nelayan?
8. Bagaimana tanggapan anda mengenai fasilitas yg sudah diadakan tapi terbengkalai?
9. Apakah ada edukasi kepada nelayan tentang bagaimana cara pemanfaatan fasilitas tersebut?
10. Mengapa fasilitas-fasilitas tersebut terbengkalai?
11. Apakah dinas sudah memfasilitasi pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan?
12. Apakah ada penyuluhan dari DKP kepada masyarakat nelayan?
13. Apakah ada pelatihan kepada masyarakat nelayan mengenai cara mengolah hasil tangkapan ?
14. Apakah ada peran dari DKP terkait meningkatkan pengetahuan masyarakat nelayan yg berkaitan dengan penunjang ekonomi masyarakat nelayan?
15. Bentuk Keterampilan Seperti Apa Yang Diselenggarakan Dinas Kelautan Dan Perikanan?

16. Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat nelayan setelah mendapatkan bantuan atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan DKP?
17. Apa saran dan harapan anda untuk perekonomian masyarakat nelayan kedepannya?

### **Kepala PPI**

1. Bagaimana potensi laut dan perikanan di Gampong Padang Baru?
2. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat nelayan desa?
3. Apa saja kebijakan dari DKP yg berhubungan dengan menunjang ekonomi nelayan?
4. Apakah ada regulasi khusus yg diterbitkan terkait dengan menunjang ekonomi nelayan?
5. Peranan seperti apakah yg sudah dilakukan DKP terkait dengan ekonomi nelayan ?
6. Apakah ada bantuan permodalan ataupun sebagainya kepada nelayan?
7. Apakah ada pengadaan fasilitas yang mendukung kerja nelayan?
8. Bagaimana tanggapan anda mengenai fasilitas yg sudah diadakan tapi terbengkalai?
9. Apakah ada edukasi kepada nelayan tentang bagaimana cara pemanfaatan fasilitas tersebut?
10. Mengapa fasilitas-fasilitas tersebut terbengkalai?
11. Apakah dinas sudah memfasilitasi pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan?
12. Apakah ada penyuluhan dari DKP kepada masyarakat nelayan?
13. Apakah ada pelatihan kepada masyarakat nelayan mengenai cara mengolah hasil tangkapan ?
14. Apakah ada peran dari DKP terkait meningkatkan pengetahuan masyarakat nelayan yg berkaitan dengan penunjang ekonomi masyarakat nelayan?

15. Bentuk Keterampilan Seperti Apa Yang Diselenggarakan Dinas Kelautan Dan Perikanan?
16. Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat nelayan setelah mendapatkan bantuan atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan DKP?
17. Siapa Saja *Stakeholders* Yang Berperan Dalam Menunjang Ekonomi Masyarakat Nelayan ?
18. Apa saran dan harapan anda untuk perekonomian masyarakat nelayan kedepannya?





## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Syafruddin , salah satu nelayan Gampong Padang Baru



Wawancara dengan Bapak Heriadi, S.Pi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Abdya



Wawancara dengan Bapak Chalid Hamdani, S.Pi, M.Sc, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Abdya



Wawancara dengan Bapak Ari Gunawan S.P, Kepala PPI Ujong Serangga





Wawancara Bapak Syafruddin dan Bapak Samsul Bahri, Nelayan Gampong Padang Baru



Wawancara dengan Bapak Hasanuddin, Panglima Laot PPI Ujong Serangga



Wawancara dengan Ibu Drh.Safriati , Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Abdya



Penyerahan Baju Pelampung Oleh Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Abdya





Penyerahan 6 Unit Mesin Robin kepada Nelayan Gampong Padang Baru



Penyerahan 6 unit perahu oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Abdyia





Wawancara dengan Panglima Laot dan Masyarakat Nelayan Gampong Padang Baru





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Fachrul Razy  
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 06 Juli 1998  
Nomor.Handphone : 081240552717  
Alamat : Kuta Tuha, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya  
Email : frazy7496@gmail.com

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Kuta Tuha  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 2 Blangpidie  
Sekolah Menengah Atas : MAN 1 Aceh Barat Daya

### Sertifikasi

Ma'had Jamiah : 68,2 | 2019 | Ma'had al-jami'ah  
TOEFL : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
TOAFL : 413 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
Komputer : B | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
Magang : 92.55 | 2020 | Kementrian Agama

Banda Aceh,

**Fachrul Razy**  
NIM. 160802107